



Kewarganegaraan dan Identitas: Menghargai Keberagaman dalam Kesatuan

M Tio Riyando

Universitas Jambi

Budi Ardianto

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: riyandotio@gmail.com

Abstrak. *The Purpose of this research is examines the dynamics of citizenship and identity in the context of diversity and unity in Indonesia, focusing on how the concept of inclusive citizenship can be effectively applied. Using a qualitative approach with a case study method, this research combines insights from political science, sociology and anthropology. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation and policy document analysis. The research findings reveal that while there is a strong commitment to diversity in national policy, its implementation still faces significant obstacles, including a lack of understanding and awareness, discrimination against minority groups, and weak coordination between central and local governments. To address the gap between the ideal (das sollen) and the reality (das sein), this study recommends increased public education and awareness, empowerment of local and community leaders, better coordination between institutions, and strengthening of affirmative policies. By implementing these recommendations, it is hoped that Indonesia can more effectively value diversity and strengthen national unity, in accordance with the spirit of "Unity in Diversity," which will ultimately create a more inclusive, just and harmonious society.*

Keywords: *Unity in Diversity ; Citizenship ; Diversity ; Multiculturalism*

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji dinamika kewarganegaraan dan identitas dalam konteks keberagaman dan kesatuan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana konsep kewarganegaraan inklusif dapat diterapkan secara efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggabungkan wawasan dari ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun terdapat komitmen kuat terhadap keberagaman dalam kebijakan nasional, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi kesenjangan antara ideal (das sollen) dan realita (das sein), penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan dan kesadaran publik, pemberdayaan pemimpin lokal dan komunitas, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, serta penguatan kebijakan afirmatif. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan nasional, sesuai dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika," yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.*

Kata Kunci: *Bhinneka Tunggal Ika ; Kewarganegaraan ; Keberagaman ; Multikulturalisme*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan elemen esensial dalam struktur sosial dan politik suatu negara. Ia tidak hanya memberikan status hukum kepada individu tetapi juga mengikat mereka dalam jaringan hak dan kewajiban terhadap negara dan sesama warga negara. Pada era globalisasi dan mobilitas tinggi saat ini, konsep kewarganegaraan menjadi semakin kompleks, mencakup isu-isu identitas, integrasi, dan keberagaman. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang sangat luas, menghadapi tantangan unik dalam memelihara kesatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman tersebut. Moto nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal

Ika," yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," menekankan pentingnya menghargai dan merayakan perbedaan sebagai bagian dari identitas nasional. Namun, dalam praktiknya, tantangan untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman masih signifikan. Konflik antar etnis, diskriminasi, dan ketidaksetaraan masih sering terjadi, menunjukkan perlunya pemahaman dan pendekatan baru dalam mengelola kewarganegaraan dan identitas di Indonesia.

Secara teoritis, kewarganegaraan tradisional biasanya dikaitkan dengan konsep-konsep legal dan administratif, seperti hak untuk tinggal, bekerja, dan berpartisipasi dalam proses politik suatu negara. Namun, dalam konteks modern, kewarganegaraan juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang lebih luas. Teori kewarganegaraan kosmopolitan, misalnya, menekankan pentingnya solidaritas global dan tanggung jawab lintas batas. Sementara itu, teori kewarganegaraan multikultural menyoroti pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam kerangka kebangsaan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengelola kewarganegaraan dan identitas di Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keberagaman dan kesatuan. Meskipun Indonesia telah berkomitmen untuk menghargai keberagaman melalui berbagai kebijakan dan program, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ideal (*das sollen*) dan realita (*das sein*). Diskriminasi etnis, ketidakadilan sosial, dan konflik antar kelompok masih menjadi tantangan yang signifikan. Secara ideal, setiap warga negara Indonesia seharusnya memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihargai identitasnya, tanpa diskriminasi. Namun, kenyataannya, masih banyak kelompok etnis dan minoritas yang mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seringkali belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap keberagaman, dengan implementasi yang masih kurang efektif di lapangan.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah yang ada dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep kewarganegaraan yang inklusif dapat diterapkan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam. Artikel ini juga akan mengeksplorasi inisiatif-inisiatif lokal yang berhasil dalam mempromosikan inklusivitas dan menghargai perbedaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pendekatan interdisipliner, menggabungkan teori-teori dari ilmu politik, sosiologi, dan antropologi untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang isu kewarganegaraan dan identitas di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan dan identitas dari perspektif teoritis dan praktis, mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara keberagaman dan kesatuan di Indonesia, mengeksplorasi inisiatif-inisiatif lokal yang berhasil dalam mempromosikan inklusivitas dan menghargai perbedaan, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks kewarganegaraan dan identitas di Indonesia dan menyumbangkan wawasan baru bagi studi kewarganegaraan dan identitas melalui pendekatan interdisipliner yang komprehensif. Dengan pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan harmonis, sesuai dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika."

KAJIAN TEORI

Teori kewarganegaraan kosmopolitan dan kewarganegaraan multikultural menjadi landasan utama dalam memahami dinamika kewarganegaraan dan identitas di era globalisasi. *Kewarganegaraan kosmopolitan* mengemukakan bahwa kewarganegaraan tidak boleh dibatasi oleh batas-batas negara, akan tetapi harus mencakup tanggung jawab global dan solidaritas lintas batas. Teori ini menekankan pentingnya melihat setiap individu sebagai bagian dari komunitas global, mengakui hak-hak asasi manusia yang universal dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan (Baharuddin, 2021).

Di sisi lain, *kewarganegaraan multikultural* menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam suatu negara. Teori ini menganggap bahwa identitas etnis, budaya, dan agama harus diakui dan dihargai sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih luas. Menurut Baharuddin (2021), kewarganegaraan multikultural menyediakan kerangka kerja di mana berbagai kelompok budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan tetap mempertahankan identitas unik mereka. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teori-teori ini dalam konteks kewarganegaraan dan identitas dapat membantu mengatasi masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan. Penelitian oleh Abdin (2023) mengungkapkan bahwa kewarganegaraan multikultural yang diterapkan secara efektif dapat mempromosikan kohesi sosial dan memperkuat identitas nasional. Di sisi lain, penelitian oleh Dewi (2021) tentang kewarganegaraan kosmopolitan menunjukkan bahwa solidaritas global dapat membantu mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketidakadilan ekonomi.

Namun, penelitian-penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal (*das sollen*) dan realita (*das sein*). Misalnya, meskipun banyak negara telah mengadopsi kebijakan multikulturalisme, implementasinya sering kali kurang efektif karena adanya resistensi budaya dan politik. Di Indonesia, meskipun terdapat komitmen terhadap keberagaman melalui moto "Bhinneka Tunggal Ika," masih banyak kelompok etnis dan minoritas yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Penelitian oleh Hakim (2023) menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan multikultural di Indonesia seringkali tidak mencapai sasaran karena kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak. Pada penelitian Yasila (2022) mengemukakan bahwa penelitian ini berusaha untuk mengisi celah yang ada dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep kewarganegaraan yang inklusif dapat diterapkan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam. Artikel ini akan mengeksplorasi inisiatif-inisiatif lokal yang berhasil dalam mempromosikan inklusivitas dan menghargai perbedaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi kasus untuk memahami secara mendalam isu kewarganegaraan dan identitas dalam konteks keberagaman di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah eksploratif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena sosial terkait penerapan kewarganegaraan inklusif dan multikultural. Metode pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner, menggabungkan perspektif ilmu politik, sosiologi, dan antropologi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas etnis, serta observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan inklusif di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait penerapan kewarganegaraan inklusif dan multikultural di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang kuat terhadap keberagaman dalam kebijakan nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.

1. Wawancara dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menerapkan kewarganegaraan multikultural adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keberagaman. Banyak kebijakan yang telah dirancang untuk menghargai keberagaman, seperti program pendidikan multikultural dan kebijakan afirmatif untuk kelompok minoritas, sering kali tidak diimplementasikan secara efektif karena resistensi budaya dan politis (Dewi, 2021). Sebagai contoh, beberapa program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas dalam kurikulum sehari-hari.
2. Observasi partisipatif di beberapa komunitas etnis menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mempromosikan inklusivitas, diskriminasi dan marginalisasi masih sering terjadi. Hal ini terutama terlihat dalam akses terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi, di mana kelompok etnis minoritas sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Menurut Nabila (2022) Penelitian ini menemukan bahwa inisiatif lokal yang berhasil dalam mempromosikan inklusivitas biasanya melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dan didukung oleh pemimpin lokal yang memiliki visi inklusif. Sebagai contoh, di beberapa daerah, program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan.
3. Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap "Bhinneka Tunggal Ika," pelaksanaannya sering kali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan kewarganegaraan inklusif (Salyo, 2022).

Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi kesenjangan antara ideal dan realita. Pertama, peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya keberagaman dan inklusivitas melalui program-program yang lebih integratif dan berbasis komunitas. Kedua, pemberdayaan pemimpin lokal dan komunitas untuk mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan menghargai perbedaan. Ketiga, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan multikulturalisme untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang

dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat lebih berhasil dalam menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan nasional, sesuai dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika." Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana kewarganegaraan inklusif dapat diterapkan dalam konteks yang sangat beragam, serta menawarkan wawasan praktis untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen kuat terhadap keberagaman dalam kebijakan nasional Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keberagaman, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif dalam pendidikan, pemberdayaan pemimpin lokal dan komunitas, serta peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mempromosikan kewarganegaraan inklusif. Dengan menerapkan rekomendasi yang diidentifikasi dalam penelitian ini, Indonesia dapat lebih efektif menghargai keberagaman dan memperkuat kesatuan nasional sesuai dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika," yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

SARAN

Untuk memperkuat kewarganegaraan inklusif di Indonesia, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya keberagaman, pemberdayaan pemimpin lokal dan komunitas untuk mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan. Selain itu, penguatan kebijakan afirmatif dan perlindungan hak-hak kelompok etnis dan minoritas harus diperkuat, serta penelitian dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan responsif terhadap dinamika sosial. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis sesuai dengan semangat "Bhinneka Tunggal Ika".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. &. (2023). Pendidikan Multikultural: Membangun Kesatuan Dalam Keanekaragaman. Jurnal Kewarganegaraan , 7 (1), 1148-1153.*
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 4 (1), 195-205.*
- Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Identitas Dan Integrasi Nasional. Jurnal Basicedu , 5 (6), 5221-5226.*
- Hakim, A. R. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan Identitas Nasional. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan , 8 (3), 1337-1346.*
- Mahardika, I. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Jurnal Pelita Bumi Pertiwi , 2 (02), 8-16.*

Nabila, A. O. (2022). Elemen Berkebhinnekaan Global Pada Buku Tematik Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Tema Indahnya Keragaman Di Negeriku. Jurnal Cakrawala Pendas , 8 (3), 788-797.

Nur, R. A. (2023). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia: Tinjauan dan Implikasi. ADVANCES in Social Humanities Research , 1 (4), 501-510.

Salyo, R. S. (2022). Pancasila di Era Milenial: Makna dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa. Jurnal Pendidikan Transformatif , 1 (2), 68-76.

Sipuan, S. W. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 8 (2), 815-830.

Sunaryati, T. S. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Moral Terhadap Peserta Didik di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , 7 (5), 2834-2840.

Yasila, K. &. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas masyarakat indonesia. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan , 11 (1), 14-20.